

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

##### Teori Akuntansi Positif

Watts dan Zimmerman (1986) yang menjelaskan tentang kebijakan akuntansi dan praktiknya dalam perusahaan serta memprediksi kebijakan apa yang akan dipilih manajer dalam kondisi-kondisi tertentu dimasa yang akan datang. Penentuan kebijakan akuntansi dan praktik yang tepat merupakan hal yang penting bagi perusahaan dalam hal penyusunan laporan keuangan. Teori ini memprediksi adanya tiga hipotesis yang mendorong manajemen untuk melakukan manajemen laba. Ketiga hipotesis tersebut yaitu: hubungan keagenan antara manajer dengan pemilik (*bonus plan hypothesis*), hubungan keagenan antara manajer dengan kreditur (*debt to equity hypothesis*), Hubungan keagenan antara manajer dan pemerintah (*political cost hypothesis*). Berikut pengertian mengenai hipotesis tersebut:

a. Hipotesis Program Bonus (*Bonus Plan Hypotesis*)

*Bonus plan hypothesis* menyatakan bahwa “*managers of firms with bonus plans are more likely to use accounting methods that increase current period reported income*”. Ada bukti empiris yang menyatakan bahwa perjanjian (kontrak) bisnis manajer dengan pihak lain merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat manajemen laba yang dilakukan perusahaan. Ada variabel yang selama diuji

berkaitan dengan perjanjian bisnis tersebut, yaitu bonus atau kompensasi manajerial (*bonus or managerial compensation*). Dalam bonus atau kompensasi manajerial, pemilik perusahaan berjanji bahwa manajer akan menerima sejumlah bonus jika kinerja perusahaan mencapai jumlah tertentu. Janji bonus inilah yang merupakan alasan bagi manajer untuk mengelola dan mengatur labanya pada tingkat tertentu sesuai dengan yang disyaratkan agar dapat menerima bonus. Seandainya pada tahun tertentu kinerja sesungguhnya berada di bawah syarat untuk memperoleh bonus, maka manajer akan melakukan manajemen laba agar labanya dapat mencapai tingkat minimal untuk memperoleh bonus. Sebaliknya, jika pada tahun tersebut kinerja yang diperoleh manajer jauh di atas jumlah yang disyaratkan untuk memperoleh bonus, manajer akan mengelola dan mengatur agar laba yang dilaporkan (*reported earnings*) menjadi tidak terlalu tinggi. Kelebihan laba sesungguhnya dengan laba yang dilaporkan akan disajikan pada tahun berikutnya. Upaya ini membuat manajer cenderung akan selalu memperoleh bonus dari periode ke periode. Akibatnya, pemilik perusahaan terpaksa harus kehilangan sebagian dari kesejahteraannya yang dibagikan kepada manajer sebagai bonus. Hipotesis ini menyatakan bahwa para manajer perusahaan yang memiliki program bonus lebih cenderung untuk memilih prosedur akuntansi yang memindahkan laba periode mendatang ke periode

berjalan. Hipotesis ini telah mendapat dukungan empiris dari Healy (1985) dan Holthousen *et al.* (1995).

b. Hipotesis Persyaratan Utang (*Debt Covenant Hypothesis*)

*Debt (equity) hypothesis* yang menyatakan bahwa “*the larger the firms debt to equity ratio, the more likely managers use use accounting methods that increase income*”. Dalam konteks perjanjian hutang, manajer akan mengelola dan mengatur labanya agar kewajiban hutangnya yang seharusnya diselesaikan pada tahun tertentu dapat ditunda untuk tahun berikutnya. Hal ini merupakan upaya manajer untuk mengelola dan mengatur jumlah laba yang merupakan indikator kemampuan perusahaan dalam menyelesaikan kewajiban hutangnya. Manajer akan melakukan pengelolaan dan pengaturan jumlah laba untuk menunda bebannya pada periode bersangkutan dan akan diselesaikannya pada periode-periode mendatang. Upaya seperti ini dilakukan agar perusahaan dapat menggunakan dana itu untuk keperluan lainnya. Walau sebenarnya hanya masalah waktu pengakuan (*timing*) kewajiban, namun hal ini sebenarnya telah mengakibatkan pihak yang ingin mengetahui kondisi perusahaan yang sesungguhnya akan memperoleh dan menggunakan informasi yang keliru. Akibatnya, pihak-pihak ini membuat keputusan bisnis yang keliru pula. Hipotesis ini menyatakan bahwa semakin dekat perusahaan ke arah pelanggaran persyaratan utang yang didasarkan atas angka akuntansi maka manajer perusahaan lebih

cenderung untuk memilih prosedur-prosedur akuntansi yang memindahkan laba periode mendatang ke periode berjalan. Sweeney (1994) menemukan bahwa tidak semua perusahaan yang melanggar syarat-syarat perjanjian melakukan kebijakan akuntansi meningkatkan laba. Temuan Sweeney membuktikan bahwa dalam menentukan kebijakan akuntansi, perusahaan-perusahaan menentukan pisah batas (*trade-off*) antara biaya dan manfaat dari perubahan kebijakan akuntansi.

c. Hipotesis Kos Politis (*Political Cost Hypothesis*)

*Political cost hypothesis* yang menyatakan bahwa “*larger firms rather than small firms are more likely to use accounting choices that reduce reported profits*”. Alasan terakhir adalah masalah pelanggaran regulasi pemerintah. Sejauh ini ada beberapa regulasi yang dikeluarkan pemerintah yang berkaitan dengan dunia usaha, misalkan undang-undang perpajakan, *anti-trust* dan monopoli, dan sebagainya. Undang-undang mengatur jumlah pajak yang akan ditarik dari perusahaan berdasarkan laba yang diperoleh perusahaan selama periode tertentu. Atau dengan kata lain, besar kecilnya pajak yang akan ditarik oleh pemerintah sangat tergantung pada besar kecilnya laba yang dicapai perusahaan. Sehingga perusahaan yang memperoleh laba lebih besar akan ditarik pajak yang lebih besar pula dan perusahaan yang memperoleh laba lebih kecil akan ditarik pajak yang lebih kecil pula. Kondisi inilah yang merangsang manajer untuk

mengelola dan mengatur labanya dalam jumlah tertentu agar pajak yang harus dibayarkannya menjadi tidak terlalu tinggi, karena manajer sebagai pengelola tentu tidak ingin kewajiban yang harus diselesaikannya terlalu membebaninya. Hal ini sangat mudah dilakukan perusahaan, yaitu dengan “menarik” biaya periode yang akan datang menjadi biaya periode berjalan dan, sebaliknya mengakui pendapatan periode berjalan menjadi pendapatan periode yang akan datang. Upaya lain yang dilakukan perusahaan untuk menghemat pajak adalah dengan memperlakukan laba pada saat ada pergantian peraturan perundang-undang yang memberlakukan tarif pajak lebih rendah dimasa depan. Perusahaan menunda pengakuan laba periode berjalan dan baru akan diakui pada saat peraturan yang baru itu diperlakukan secara efektif. Hipotesis ini menyatakan bahwa semakin besar kos politis yang dihadapi perusahaan, maka manajer cenderung untuk menangguhkan laba berjalan ke masa mendatang. Penelitian terhadap hipotesis ini dilakukan oleh Watts dan Zimmerman (1978) dan Jones (1991).

### **Teori Agensi**

Teori agensi adalah sebuah teori yang menjadi dasar hubungan antara pemilik (*principal*) dengan pengelola (*agent*). Menurut Jensen dan Meckling (1976) hubungan antara pemilik (*principal*) dengan pengelola (*agent*) terjadi karena adanya sebuah kontrak dimana pengelola (*agent*) diminta untuk melakukan jasa atas nama pemilik (*principal*) sekaligus

memberikan beberapa wewenang untuk mengambil keputusan kepada pemilik (*principal*). *Principal* menyediakan fasilitas dan dana untuk mengelola perusahaan, di lain pihak *agent* mempunyai kewajiban untuk mengelola perusahaan sesuai dengan yang diamanahkan oleh pemegang saham sekaligus memberikan laporan periodik pada *principal* tentang usaha yang dijalankannya. Hubungan tersebut menimbulkan terjadinya konflik yang dinamakan konflik agensi (Jensen dan Meckling, 1976). Pada satu sisi manajemen melakukan pengelolaan secara langsung, dan di sisi lain agen memiliki lebih banyak informasi dibandingkan dengan *principal*, hal ini menimbulkan terjadinya ketidakseimbangan informasi (asimetri informasi). Asimetri informasi dapat diselaraskan apabila manajemen selaku pengelola berperan sekaligus sebagai pemilik karena dinilai dapat mengurangi perbedaan kepentingan antara kepemilikan luar dengan pihak manajemen Jensen dan Meckling (1976).

Menurut Ariyoto dkk, (2000) konflik agensi dapat dikendalikan dengan menggunakan konsep tata kelola perusahaan. Konsep tata kelola perusahaan diusulkan untuk mencapai pengelolaan perusahaan yang lebih transparan bagi semua pengguna laporan keuangan. Jika konsep tersebut digunakan dengan baik maka akan memberikan keuntungan bagi banyak pihak (Nasution & Setiawan, 2007). Forum *Corporate Governance* di Indonesia (FCGI) mengembangkan alat untuk menilai *good corporate governance* yang juga dapat digunakan sebagai alat audit yang beberapa indikatornya adalah dewan komisaris dan komite audit (FCGI 2003).

Menurut Marks (2003) nilai tambah untuk semua stakeholder dapat diatur dan dikendalikan melalui *Corporate Governance*. Mekanisme *good corporate governance* memiliki kemampuan dalam kaitannya menghasilkan suatu laporan keuangan yang memiliki kandungan informasi laba.

### **Manajemen Laba**

Sulistyanto (2018) menyatakan manajemen laba dapat dikatakan sebagai upaya manajerial untuk mengintervensi informasi dalam laporan keuangan dengan cara memanfaatkan kebebasan memilih dan menggunakan metode akuntansi dan menentukan nilai estimasi akuntansi. Upaya mempengaruhi laporan keuangan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai macam cara sesuai dengan kepentingan manajer, selama yang dilakukan manajer masih dalam ruang lingkup prinsip akuntansi berterima umum maka akan tetap diakui dan diperbolehkan. Manajemen laba adalah suatu tindakan memaksimumkan atau meminimumkan laba untuk tujuan tertentu (Copeland, 1968). Manajemen laba adalah alat sah manajer untuk melakukan tanggung jawab untuk mendapatkan keuntungan atau return perusahaan (Fischer dan Rosenzweigh 1995). Tindakan manajemen laba termasuk tindakan yang etis dan wajar jika tidak bertentangan dengan standar akuntansi, dan manajemen laba adalah sebuah hal yang legal (Merchant dan Rockness 1994). Sampai saat ini masih ada kontroversi dalam memandang dan memahami manajemen laba, secara umum

kontroversi ini terjadi antara praktisi dan akademi yang pada dasarnya mempertanyakan apakah manajemen laba dapat dikategorikan sebagai kecurangan (*fraud*) atau tidak (Sulistyanto, 2018). Menurut Healy dan Wahlen (1999) menyatakan proses pengambilan langkah tertentu yang disengaja untuk menghasikan tingkat laba yang diinginkan. Manajemen laba dapat dilakukan dengan beberapa upaya, dan upaya manajemen laba akan berhasil apabila apabila manajer mengetahui pemakai laporan keuangan tidak mempunyai akses dan sumber informasi yang memadai (Sulistyanto, 2018).

#### **Kepemilikan Manajerial**

Herawaty (2007) berpendapat bahwa kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh manajemen secara pribadi termasuk didalamnya dewan direksi, dewan komisaris dan komite audit dinamakan kepemilikan manajerial. (Boediono, 2007) menyatakan dari seluruh modal saham perusahaan yang dikelola oleh pihak manajemen, jumlah kepemilikan yang dimiliki oleh pihak manajemen disebut kepemilikan manajerial. Pemegang saham dari pihak manajemen pribadi termasuk didalamnya direktur dan komisaris yang ikut serta secara aktif adalah kepemilikan manajerial (Wiryadi & Sebrina, 2013).

#### **Kepemilikan Institusional**

Saham perusahaan tidak hanya dimiliki oleh pihak manajer perusahaan, namun juga dimiliki oleh institusi dan saham perusahaan yang

dimiliki oleh intitusi termasuk didalamnya adalah bank, perusahaan asuransi, perusahaan dana pensiun, perusahaan investasi dan yayasan adalah kepemilikan institusional (Saptantinah 2005). Tarjo (2008) menyatakan sebuah kepemilikan yang dimiliki oleh intitusi lain dan lembaga disebut kepemilikan institusional. Dewi (2005) berpendapat pihak institusi yang memiliki proporsi kepemilikan saham dengan persentase jumlah kepemilikan saham intitusional terhadap jumlah kepemilikan seluruh saham adalah kepemilikan institusional.

### **Kepemilikan Publik**

Menurut Wijayanti (2009) masyarakat umum yang tidak memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan dapat memiliki saham perusahaan, proporsi atau jumlah kepemilikan saham tersebut dinamakan kepemilikan publik. Kepemilikan publik diukur dengan persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak luar (*outsider ownership*). Kepemilikan publik ialah saham yang dipunyai oleh publik, kepemilikannya dapat oleh suatu grup yang besar yang tidak terdapat hubungannya antara pribadi dan atau sebuah lembaga investasi (Ridwan & Berlian, 2003). Hal yang sama diungkapkan oleh Delima & Herawaty (2020) mengenai kepemilikan publik, kepemilikan publik yaitu besar persentase saham perusahaan yang dimiliki oleh publik. Kepemilikan publik merupakan upaya untuk memperluas pasar saham perusahaan sehingga membawa pengaruh yang menguntungkan nilai saham perusahaan (Carlson dan Bathala, 1997)

### **Dewan Komisaris**

Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 ayat 6, dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Definisi dewan komisaris menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG 2006) adalah bagian dari organ perusahaan yang bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan *Good Corporate Governance*, namun dewan komisaris tidak diperbolehkan untuk turut serta dalam mengambil keputusan operasional. Menurut Mudiastuty dan Machfoedz (2003) tugas utama dewan komisaris adalah melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada eksekutif perusahaan.

### **Komite Audit**

Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: Kep-103/MBU/2002, yang menyatakan bahwa komite audit adalah suatu badan yang berada dibawah komisaris yang sekurang-kurangnya minimal satu orang anggota komisaris, dan dua orang ahli yang bukan merupakan pegawai BUMN yang bersangkutan yang bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun pelaporannya dan bertanggungjawab langsung kepada komisaris atau dewan pengawas. Hal tersebut senada

dengan keputusan ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) Nomor: Kep-41/PM/2003 yang menyatakan bahwa komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya. Komite yang ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan atau penelitian tentang pengelolaan fungsi direksi dalam pengelolaan perusahaan terbuka yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris perusahaan dan dibentuk oleh dewan komisaris terbuka dinamakan komite audit (Hamdani 2016). Keputusan Menteri BUMN No: Kep-117/M-MBU/2002 menjelaskan tentang tugas Komite Audit dalam membantu Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, salah satu tugas komite audit yang disebutkan adalah menunaikan tugas dan kewajiban lainnya yang diberikan oleh dewan komisaris.

#### B. Hasil Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian yang pernah dilakukan terkait kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kepemilikan publik, dewan komisaris, dan komite audit terhadap manajemen laba. Penelitian-penelitian tersebut diantaranya sebagai berikut.

No	Penulis dan Identitas Jurnal	Variabel Yang Digunakan	Hasil
1	Azlina, N. (2010)	<b>Variabel Independen :</b> X1 : Kepemilikan Publik  <b>Variabel Dependen :</b> Manajemen Laba	1. Kepemilikan publik tidak berpengaruh terhadap manajemen laba
2	Jao, R., & Pagalung, G. (2011)	<b>Variabel Independen :</b> X1 : Kepemilikan Manajerial X2 ; Kepemilikan	1. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap manajemen laba 2. Kepemilikan institusional

		<p>Institusional X3 ; Dewan Komisaris X4 : Komite Audit</p> <p><b>Variabel Dependen :</b> Manajemen Laba</p>	<p>berpengaruh negatif terhadap manajemen laba 3. Dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap manajemen laba 4. Komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba</p>
3	Sumanto, B., Asrori, A., & Kiswanto, K. (2014)	<p><b>Variabel Independen :</b> X1 : Kepemilikan Institusional X2 : Dewan Komisaris</p> <p><b>Variabel Dependen :</b> Manajemen Laba</p>	<p>1. Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. 2. Dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap manajemen laba</p>
4	Suriyani, P. P., dkk (2015)	<p><b>Variabel Independen :</b> X1 : Kepemilikan Institusional X2 : Kepemilikan Publik X3 : Dewan Komisaris X4 : Komite Audit</p> <p><b>Variabel Dependen :</b> Manajemen Laba</p>	<p>1. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap manajemen laba 2. Kepemilikan publik berpengaruh positif terhadap manajemen laba 3. Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap manajemen laba 4. Komite Audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba</p>
5	Salim, M. N., & Hn, M. R. (2015)	<p><b>Variabel Independen :</b> X1 : Kepemilikan Manajerial X2 : Kepemilikan Institusional X3 : Komite Audit</p> <p><b>Variabel Dependen :</b> Manajemen Laba</p>	<p>1. Kepemilikan Manajerial berpengaruh negatif terhadap manajemen laba 2. Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap manajemen laba 3. Komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba</p>
6	Alzoubi, E. S. S. (2016)	<p><b>Variabel Independen :</b> X1 : Kepemilikan Manajerial X2 : Kepemilikan Institusional</p> <p><b>Variabel Dependen :</b> Manajemen Laba</p>	<p>1. Kepemilikan Manajerial berpengaruh negatif terhadap manajemen laba 2. Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap manajemen laba</p>
7	Kusumaningtyas, M., & Farida, D. N. (2016)	<p><b>Variabel Independen :</b> X1 : Kepemilikan Manajerial X2 : Kepemilikan Institusional X3 : Kepemilikan Publik</p>	<p>1. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 2. Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap manajemen laba</p>

		X4 : Komite Audit <b>Variabel Dependen :</b> Manajemen Laba	3. Kepemilikan publik tidak berpengaruh terhadap manajemen laba 4. Komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba
8	Larastomo, J., dkk (2016)	<b>Variabel Independen :</b> X1 : Kepemilikan Manajerial X2 : Dewan Komisaris X3 : Komite Audit <b>Variabel Dependen :</b> Manajemen Laba	1. Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap manajemen laba 2. Dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap manajemen laba 3. Komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba
9	Lidiawati, N., & Asyik, N. F. (2016)	<b>Variabel Independen :</b> X1 : Kepemilikan Institusional X2 : Komite Audit <b>Variabel Dependen :</b> Manajemen Laba	1. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap manajemen laba 2. Komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba
10	Susanto, Y. K., & Pradipta, A. (2016)	<b>Variabel Independen :</b> X1 : Kepemilikan Institusional X2 : Kepemilikan manajerial X3 : Dewan Komisaris X4 : Komite Audit <b>Variabel Dependen :</b> Manajemen Laba	1. Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. 2. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap manajemen laba 3. Dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap manajemen laba 4. Komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba
11	Sutino, E. R. D., & Khoiruddin, M. (2016)	<b>Variabel Independen :</b> X1 : Kepemilikan Manajerial X2 : Kepemilikan Institusional X3 : Dewan Komisaris X4 : Komite Audit <b>Variabel Dependen :</b> Manajemen Laba	1. Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh terhadap manajemen laba 2. Kepemilikan Institsional tidak berpengaruh terhadap manajemen laba 3. Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap manajemen laba 4. Komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba
12	Astari, A. A. M. R., & Suryanawa, I. K. (2017)	<b>Variabel Independen :</b> X1 : Kepemilikan Manajerial X2 : Kepemilikan	1. Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap manajemen laba 2. Kepemilikan institusional

		Institusional <b>Variabel Dependen :</b> Manajemen Laba	berpengaruh negatif terhadap manajemen laba
13	Dimara, R. J. S., & Hadiprajitno, P. B. (2017)	<b>Variabel Independen :</b> X1 : Kepemilikan Manajerial X2 : Komite Audit <b>Variabel Dependen :</b> Manajemen Laba	1. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 2. Komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.
14	Dwiharyadi, A. (2017)	<b>Variabel Independen :</b> X1 : Komite Audit X2 : Dewan Komisaris <b>Variabel Dependen :</b> Manajemen Laba	1. Komite Audit berpengaruh positif terhadap manajemen laba 2. Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap manajemen laba
15	Firnanti, F. (2017)	<b>Variabel Independen :</b> X1 : Kepemilikan Manajerial X2 : Kepemilikan Institusional X3 : Dewan Komisaris X4 : Komite Audit <b>Variabel Dependen :</b> Manajemen Laba	1. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap manajemen laba 2. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap manajemen laba 3. Dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap manajemen laba 4. Komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba
16	Kodriyah, K., Suprihatin, N. S., & Octaviani, S. (2017)	<b>Variabel Independen :</b> X1 : Dewan Komisaris X2 : Komite Audit <b>Variabel Dependen :</b> Manajemen Laba	1. Dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap manajemen laba 2. Komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba
17	Kristanti, F. T., & Hendratno, H. (2017)	<b>Variabel Independen :</b> X1 : Kepemilikan Manajerial X2 : Kepemilikan Institusional <b>Variabel Dependen :</b> Manajemen Laba	1. Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap manajemen laba 2. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap manajemen laba
18	Mabrurah, L., & Islahuddin, M. A. (2017)	<b>Variabel Independen :</b> X1 : Dewan Komisaris <b>Variabel Dependen :</b> Manajemen Laba	1. Dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap manajemen laba

19	Widyaningsih, H. (2017)	<b>Variabel Independen :</b> X1 : Kepemilikan Manajerial X2 : Kepemilikan Institusional  <b>Variabel Dependen :</b> Manajemen Laba	1. Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap manajemen laba 2. Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap manajemen laba
20	Giovani, M. (2019)	<b>Variabel Independen :</b> X1 : Kepemilikan Manajerial X2 : Kepemilikan Institusional X3 : Dewan Komisaris X4 : Komite Audit  <b>Variabel Dependen :</b> Manajemen Laba	1. Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap manajemen laba, 2. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap manajemen laba 3. Dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap manajemen laba 4. Komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba

### C. Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis

#### Kepemilikan Manajerial terhadap Manajemen Laba

Kepemilikan manajerial adalah jumlah persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak manajemen (Boediono, 2005). Kepemilikan saham manajerial dinilai menyetarakan kepentingan manajer dengan pemegang saham, karena manajer turut mendapatkan keuntungan dari keputusan yang diambil dan manajer dan menanggung resiko jika ada kerugian yang muncul sebagai hasil dari pengambilan keputusan yang buruk (Giovani 2019). Semakin tinggi proporsi kepemilikan manajemen dalam perusahaan akan mampu mempersatukan kepentingan manajer dan pemegang saham yang mengakibatkan kinerja perusahaan semakin baik (Anggraeni & Hadiprajitno 2013). Hal ini didukung oleh Jensen &

Meckling (1976) dalam teori agensi. Di dalam teori agensi terdapat konflik agensi yang disebabkan oleh asimetri informasi, asimetri informasi dapat diselaraskan apabila manajemen selaku pengelola berperan sekaligus sebagai pemilik karena dinilai dapat mengurangi perbedaan kepentingan antara kepemilikan luar dengan pihak manajemen (Zeptian & Rohman, 2013).

Hasil penelitian Kusumawardhani (2012), Lestari & Murtanto (2018) dan Purnama (2020) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Apabila manajemen sebagai pengelola sekaligus pemilik saham didalam perusahaan, manajer takan bertindak sebagai pemegang saham sehingga manajer mengupayakan pengelolaan terbaik terhadap perusahaan (Kristianti, dkk 2014). Dari penelitian tersebut maka hipotesis penelitian ini adalah:

**H<sub>1</sub>: Kepemilikan Manajerial berpengaruh negatif terhadap Manajemen Laba**

**Kepemilikan Institusional terhadap Manajemen Laba**

Kepemilikan Institusional adalah persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi lain diluar manajemen perusahaan (Indriastuti, 2012). Peran kepemilikan institusional dapat memonitor tingkah laku manajer sehingga peluang manajer untuk melakukan manajemen laba akan lebih kecil (Sumanto, dkk 2014). Tindakan manajer yang diawasi akan mengurangi kesempatan manajer untuk melakukan pengelolaan yang

bersifat curang (Arifin & Destriana, 2016). Menurut teori agensi yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976) didalam hubungan kontrak yang terjadi antara pihak pengelola dengan pemilik saham terdapat kemungkinan terjadinya perbedaan tujuan yang dapat menimbulkan konflik karena pihak manajemen sebagai pengelola lebih banyak mengetahui tentang perusahaan. Monks & Minow, (1995) menyatakan konflik agensi dapat dikurangi dengan kepemilikan oleh institusional. Pemilik saham institusi akan mendorong peningkatan informasi yang lebih optimal dan melakukan pengawasan terhadap pihak manajemen yang dapat mengurangi perilaku oportunistik manajer sehingga pemilik institusi mendapatkan informasi yang setara dengan manajer (Sari & Nur 2013).

Penelitian yang dilakukan oleh Sumanto dkk, (2014), Salim & Hn, (2015), dan Kusumaningtyas & Farida, (2016) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Semakin besar kepemilikan yang dimiliki institusi maka semakin kuat dorongan untuk mendapatkan informasi terkait manajemen. Oleh karena itu, semakin besar persentase saham yang dimiliki institusi, maka semakin kecil kemungkinan terjadinya manajemen laba (Giovani, 2019). Maka hipotesis penelitian ini adalah:

**H<sub>2</sub>: Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap Manajemen Laba**

## **Kepemilikan Publik terhadap Manajemen Laba**

Kepemilikan publik adalah persentase saham perusahaan yang dimiliki oleh masyarakat yang tidak memiliki ikatan dengan manajemen (Suriyani dkk 2015). Ginantara & Putra (2015) menyatakan proporsi kepemilikan publik tinggi dalam suatu perusahaan membuat manajemen harus selalu dituntut untuk menunjukkan kredibilitas yang baik dengan cara menampilkan performa laporan keuangan yang sesuai dengan keinginan investor seperti menstabilkan rasio-rasio keuangan yang dapat mempengaruhi keputusan investor. Hal tersebut dilakukan agar investor mau terus menginvestasikan dana pada perusahaan, karena kondisi tersebut manajemen cenderung melakukan manajemen laba agar selalu dapat menampilkan kinerja yang terbaik dalam perusahaan (Sriyani, dkk 2015). Kinerja perusahaan yang selalu baik akan mempengaruhi para keputusan investor untuk berinvestasi (Azlina, 2010). Hal tersebut didukung oleh teori akuntansi positif Watts dan Zimmerman (1986) dalam hipotesis plan bonus atau hipotesis kompensasi manajerial, pemilik perusahaan berjanji bahwa manajer akan menerima sejumlah bonus jika kinerja perusahaan mencapai jumlah tertentu. Janji bonus inilah yang merupakan alasan bagi manajer untuk mengelola dan mengatur labanya pada tingkat tertentu sesuai dengan yang disyaratkan agar dapat menerima bonus. Kelebihan laba sesungguhnya dengan laba yang dilaporkan akan disajikan pada tahun berikutnya. Upaya ini membuat manajer cenderung akan selalu memperoleh bonus dari periode ke periode. Hipotesis ini

didukung oleh Healy (1985) dan Holthousen *et al.* (1995) yang menyatakan bahwa para manajer perusahaan yang memiliki program bonus lebih cenderung untuk memilih prosedur akuntansi yang memindahkan laba periode mendatang ke periode berjalan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Suriyani dkk (2015) dan Delima & Herawaty (2020) kepemilikan publik berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Michelson, et. Al (2000) menyatakan semakintinggi tingkat kepemilikan publik, maka perusahaan cenderung melakukan manajemen laba. Maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

**H<sub>3</sub>: Kepemilikan Publik berpengaruh positif terhadap Manajemen Laba**

#### **Dewan Komisaris terhadap Manajemen Laba**

Dewan komisaris mempunyai kewajiban untuk melakukan monitor atas laporan keuangan perusahaan (Boediono, 2005). Dewan komisaris termasuk dalam indikator pengukuran *good corporate governance* dan merupakan mekanisme pengendalian internal yang paling tinggi menurut Forum *Corporate Governance* di Indonesia (FGPI 2003). Konflik agensi yang terdapat didalam teori agensi yang dikemukakan oleh (Jensen dan Meckling, 1976) mengakibatkan munculnya konsep *corporate governance* Ariyoto dkk (2000). Dewan komisaris termasuk dalam indikator penilaian *corporate governance*, adanya dewan komisaris diharapkan dapat menciptakan pengelolaan perusahaan yang lebih transparan bagi semua pengguna laporan keuangan. Jika dewan komisaris menjalankan tugas

dengan baik maka akan memberikan keuntungan bagi semua pihak. Hal tersebut dikarenakan kemungkinan direksi melakukan manajemen laba lebih kecil (Nasution & Setiawan 2007).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sumanto dkk (2014), Salim & Hn (2015), dan Mabruah & Islahuddin (2017) menyatakan bahwa Dewan Komisaris berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Saat pihak direksi diawasi dalam melakukan pekerjaannya oleh tim pengawas, maka pihak manajemen akan bekerja dengan sebaik-baiknya sehingga kemungkinan kecil untuk terjadinya manajemen laba (Prastiti & Meiranto 2013). Oleh karena itu, hipotesis dalam penelitian ini adalah:

**H<sub>4</sub>: Dewan Komisaris berpengaruh negatif terhadap Manajemen Laba Komite Audit terhadap Manajemen Laba**

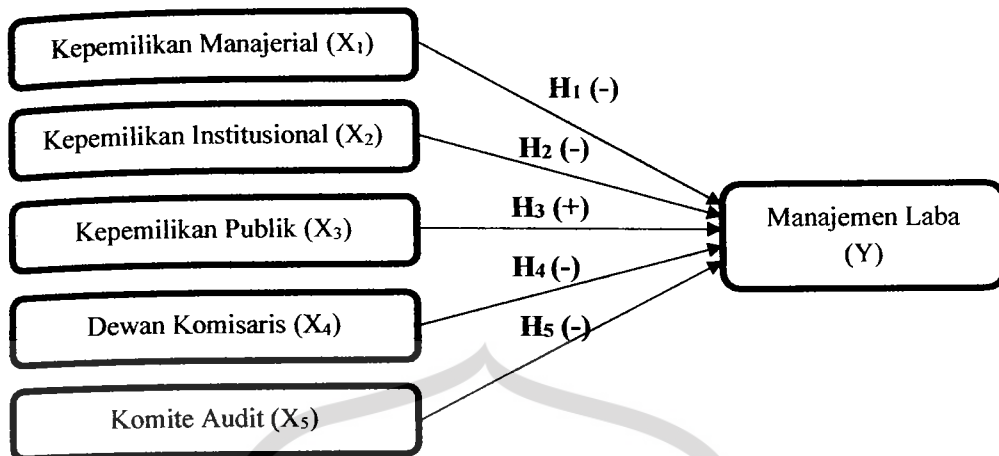
Badan Pengawasan Pasar Modal (Bapepam) Nomor: Kep-41/PM/2003 yang menyatakan bahwa komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya. Dalam teori agensi Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan hubungan antara pemilik dan pengelola. Hubungan tersebut menimbulkan terjadinya konflik yang dinamakan konflik agensi. Menurut Ariyoto dkk (2000) konflik agensi dapat dikendalikan dengan konsep *good corporate governance*. Selain berada dibawah naungan dewan komisaris, komite audit juga termasuk dalam indikator penilaian *good corporate*

*governance* sehingga dapat mengendalikan konflik keagenan (Marks, 2003). Komite audit dinilai dapat mengendalikan konflik keagenan karena salah satu tugasnya membantu dewan komisaris dalam mengawasi kinerja direksi dinilai dapat mengurangi kecurangan (*fraud*) yang dilakukan oleh manajemen dengan cara manajemen laba (Effendi & Daljono 2013).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Suriyani dkk (2015), Kusumaningtyas & Farida (2016), dan Kodriyah dkk (2017) membuktikan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Semakin tinggi tingkat pengawasan yang dilakukan oleh komite audit, maka semakin rendah peluang manajemen untuk melakukan tindakan oportunistik terhadap manajemen laba (Effendi & Daljono 2013). Maka hipotesis dari penelitian ini adalah:

**H<sub>5</sub>: Komite Audit berpengaruh negatif terhadap Manajemen Laba**

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan, dalam penelitian ini menggunakan variabel independen yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kepemilikan publik, dewan komisaris, dan komite audit sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah manajemen laba.



**Gambar 2.2**  
**Kerangka Pemikiran**

